

*Agus Purwanto*

**MANFAAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH  
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN**

Agus Purwanto \*

**ABSTRACT**

The objectives of this research were (1) To determine the benefits of community development / local institutions that have been implemented by the government (2) To determine the assistance that has been done by the government of businessmen-small entrepreneurs in Sub district Pedan (3) To determine the skill level of the community before and after the training conducted by the government through the PNPM program (4) To determine differences in the welfare of people in the District Pedan before and after there is direct assistance by government funds through PNPM program.

This research was conducted in the District of Klaten sub district Pedan. By taking a sample of 40 respondents. Data analysis technique using different test and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio).

The research found that there is a difference between before and after the implementation of the PNPM program on community empowerment, mentoring, training, and direct grants. PNPM program is effective because it can increase empowerment, mentoring, training and financial assistance loans to the public, so concluded is helpful.

Keywords: empowerment, mentoring, training, grants, PNPM

---

\* Drs Agus Purwanto, M.Si adalah Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Alamat kantor: Jl Walanda Maramis No. 31, Cengklik, Surakarta.

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks di Indonesia sekarang ini. Namun penanganan selama ini belum optimal dan tidak berkelanjutan. Munculnya Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) merumuskan kembali langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan yaitu melalui PNPM. Dalam pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu ditumbuhkembangkan sehingga bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perencanaan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas sehingga kebutuhan masyarakat bisa terjawab.

Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat

pertumbuh-an ekonomi dengan daerah sekitarnya.

Peran masyarakat dalam pembangunan dituntut semaksimal mungkin melalui ide, inovatif dan tindakan nyata untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu usaha kecil menengah adalah salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat pedesaan untuk dikembangkan. Hal ini sangat relevan dengan keadaan social ekonomi pada masyarakat pedesaan, misalnya: tingkat pengangguran yang tinggi, ketergantungan pada kota besar, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya sumber daya alam yang belum dikelola dan lainlain. Dengan adanya usaha kecil menengah di tingkat daerah khususnya kecamatan, kekurangan-kekurangan yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya tinggi, mempunyai kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi untuk me-manfaatkan sumber daya yang belum dikelola secara optimal, sehingga usaha kecil menengah menjadi salah satu jalan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemberdayaan pen-dampingan, tingkat ketrampilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat/ ke-lembagaan lokal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten sebelum dan setelah dilaksanakan PNPM.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peranan

Peranan menurut Poerwodarminto (2013: 175) sebagai berikut: "Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa." Menurut Soejono Soekanto (2011: 268) mengatakan bahwa: "Peranan diartikan sebagai suatu aspek yang dinamis dari pada kedudukan (status) sesuai dengan hak dan kewajiban". Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa peranan adalah yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal

dan aspek dinamis daripada kedudukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Miftah Thoha (2009: 187) memberi batasan bahwa: “Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu”.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang dilaksanakan menurut tugas dan kewajiban oleh individu sesuai dengan kedudukanya.

Dalam suatu Negara, pemerintah memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan tujuan Negara. Pemerintah harus mampu menjabatani kepentingan yang ada dalam masyarakat, ia harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Sebagai pelayan yang baik bagi masyarakat seharusnya pemerintah dapat melayani masyarakat dengan memuaskan. Peran dari pemerintah yang lain adalah sebagai penentu kebijakan. Hal ini dikatakan bahwa presiden (eksekutif), Lembaga Yudikatif, Lembaga Legislatif bahkan badan-badan administrasi mempunyai tugas masing-masing dalam penentuan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil biasanya dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Sehingga dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah yang menjamur dalam masyarakat.

### **B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan

sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Anon, 2007: 10).

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pendekatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
2. Memosisikan masyarakat sebagai penentu/ pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis.
5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Pada dasarnya ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi :

- a. Penyediaan dan persediaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan

ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.

- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Penempatan papan informasi tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga terbuka dan diletakkan di tempat-tempat umum yang biasa dikunjungi orang, seperti : pasar, balai desa, pos ojek, Puskesmas, tempat ibadah dan lain-lain. Berkaitan dengan papan informasi, hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a. Informasi yang ditempelkan di papan informasi diusahakan menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti masyarakat umum.
- b. Dalam papan informasi selalu dituliskan nomor kotak pos 612 JKP Jakarta, nama dan alamat FK sebagai media pengaduan masyarakat. Hal itu dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan oleh masyarakat, disarankan papan informasi disediakan kotak saran dan pengaduan yang secara periodic dibuka oleh FK. Setiap pengaduan agar segera ditindak lanjuti sesuai prinsip dan prosedur penanganan pengaduan, terbuka serta adanya partisipasi masyarakat. Permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan agar selalu dilaporkan ke jenjang di atasnya, untuk memastikan penanganannya telah sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Sekali waktu warga masyarakat dikumpulkan di depan

papan I nformasi. Fasilitator Kecamatan, pendamping Lokal, FD atau TPK menjelaskan apa yang di-informasikan dalam papan informasi tersebut.

### **C. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan**

#### **1. Sosialisasi**

Sebagai langkah awal ketika akan dilaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dalam PNPM adalah upaya memperkenalkan atau memberi pemahaman kepada perangkat pemerintah, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam tahap ini pemerintah kecamatan berperan dalam mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi ini adalah dimengerti dan dipahami secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan oleh pelaku-pelaku pendukung PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program.

#### **2. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan program dilakukan setelah proses

perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan dan pengajuan dana, penderahan tenaga kerja, pengadaan barang atau jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personel tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Tim pengelola kegiatan yang diajukan oleh masyarakat kemudian disahkan oleh Pemerintah Kecamatan.

### 3. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Dalam tahap ini Pemerintah Kecamatan memastikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

### 4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Pedan termasuk di dalamnya para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala baik oleh Pemerintah Kecamatan, masyarakat maupun pihak independen seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak.

## D. Tugas Sosial

### 1. Pengertian Kerja sama

Kerja sama adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok dengan didasari harapan bahwa

mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan atau bersama-sama akan lebih efektif dibandingkan jika dilakukan oleh individu (Srikandi Waluyo, 2013: xiii).

Perubahan selalu terjadi di semua tempat, semua itu menuntut fleksibilitas individual, tim dan organisasi jika mereka ingin menjadi efektif dan tetap bertahan.

Sebuah tim juga individu harus merefleksikan diri mereka dalam fungsinya dan beradaptasi sesuai dengan perubahan itu sendiri.

Orientasi tersebut membutuhkan antara lain :

- Kemampuan membaca situasi lingkungan dengan cepat.
- Kepedulian terhadap berfungsinya tim.
- Fleksibilitas atau kesiapan terhadap perubahan.
- Toleransi terhadap sifat ambigu dan perbedaan di dalam tim.
- Persiapan untuk menerima ketidakpastian ketika perubahan terjadi.

Satu alasan mengapa resep sederhana tidak dapat menciptakan tim yang efektif adalah karena tim beroperasi dalam lingkungan tim yang bervariasi. Sementara itu efektivitas tim diperlukan oleh semua bidang, dan mereka yang menjadi anggota tim memiliki latar belakang dan kepribadian yang perbedaan pula.

## 2. Fungsi Tim

Ada dua dimensi dasar dari fungsi tim, yaitu tugas yang harus diemban oleh tim dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bagaimana para anggotanya merasakan tim sebagai sebuah unit sosial.

Menurut Michael West dalam bukunya "*Effective Teamwork*" yang telah diterjemahkan oleh (Srikandi Waluyo, 2013: 29). bahwa efektivitas tim mencakup tiga komponen utama, yaitu :

- Efektivitas tugas adalah suatu tingkat dimana tim berhasil meraih hal-hal yang berhubungan dengan tugas.
- Kesehatan mental diartikan sebagai kesejahteraan, pertumbuhan dan perkembangan para anggota tim.

- c. Keberlangsungan tim adalah memungkinkan tim untuk terus – menerus bekerja sama dan berfungsi efektif.

Unsur tugas dan unsur sosial disajikan bersama untuk menggambarkan empat tipe ekstrim fungsi tim dan dampaknya terhadap ketiga prinsip yang dihasilkan olehnya; Efektivitas tugas, kesehatan mental anggota tim, dan keberlangsungan tim. Keempat tipe tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tipe A ; Tim yang berfungsi penuh

Tipe ini menggambarkan sebuah tim yang tinggi, baik dalam tugas maupun refleksi sosialnya. Tim tersebut memiliki efektivitas tugas dan kesehatan mental para anggota yang tinggi, juga keberlangsungannya bersifat permanen, mereka cenderung ingin meneruskan bekerja sama dalam suatu periode waktu.

- 2) Tipe B ; Tim yang menyenangkan

Tim ini menggambarkan sebuah tim yang memiliki refleksi sosial tinggi, tetapi refleksivitas tugasnya rendah. Tim tersebut memiliki kehangatan, saling mendukung dan kohesif diantara para anggotanya, tetapi kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya rendah. Akibatnya keberlangsungan tim terancam, meskipun mereka berharap untuk dapat bekerja sama lebih lama lagi. Hal ini karena tingkat kompetensi rendah dan efektivitas tugas minimal.

- 3) Tipe C ; Tim yang mengalami disfungsi

Tim ini menggambarkan skenario terburuk karena rendahnya refleksi dalam tugas maupun sosialnya. Keberlangsungan tim seperti ini sangatlah rendah karena para anggotanya akan merasa tidak puas, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam cita rasa kualitas yang dialami dalam melakukan tugas.

- 4) Tipe D ; Tim dengan efisiensi yang kaku

Tim ini memiliki refleksi tugas yang tinggi, tetapi fungsi sosialnya buruk. Prestasi dalam tim seperti ini umumnya tinggi, tetapi keberlangsungan dan kesehatan mental para anggota tim dipengaruhi oleh fungsi sosialnya yang buruk. Para anggota

tim cenderung untuk tidak mau lama–lama bekerja sama karena menganggap buruknya dukungan iklim sosial tim tersebut.

Aspek–aspek penting dari sebuah tim antara lain :

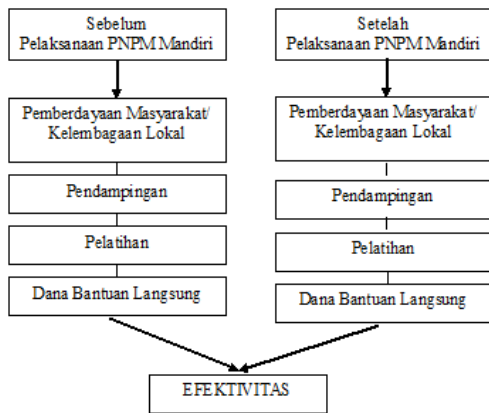
- a) Tujuan – tujuan tim
- b) Partisipasi dalam tim
- c) Orientasi terhadap tugas
- d) Dukungan untuk inovasi

### 3. Efektivitas Kerja

Mengingat manusia telah belajar bekerja sama, kita telah mencapai kemajuan yang menjubkan. Bekerja sama membuat kita mampu melakukan lebih banyak hal dari pada jika kita bekerja sendirian. Ini adalah karena prinsip sinergi, yaitu bahwa suatu kesatuan adalah lebih baik dibandingkan dengan sejumlah bagian – bagian. Riset membuktikan bahwa pada banyak bidang aktivitas dan upaya manusia, kerja sama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Dalam mencapai kerja sama kelompok yang efektif sering terjadi hambatan yang cukup berpengaruh, yaitu ; Keengganan Sosial (*Social loafing*), yaitu kurangnya kesungguhan dari masing–masing individu jika berada atau bekerja sama dalam kelompok. Mereka cenderung kurang bertanggung jawab dalam kelompok dari pada mereka bekerja sendiri. Fenomena inilah yang mengakibatkan rendahnya prestasi kelompok. Namun meskipun dugaan bahwa kelompok – kelompok tersebut dapat berfikir rasional dan logis, ternyata pertimbangan – pertimbangan hierarkis sangat berpengaruh pada kebijakan kelompok. Lebih jauh lagi, pribadi – pribadi yang menonjol dalam kelompok dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada hasil keputusan kelompok (Srikandi Waluyo, 2013: 5).

Berangkat dari teori dan latar belakang masalah, maka penulis mengetengahkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat daerah Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Alasan dipilih daerah Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten tersebut sebagai objek dalam penelitian ini adalah adanya kesediaan dari pihak instansi untuk memberikan ijin yang peneliti perlukan, juga lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga lebih menghemat waktu, biaya serta tenaga.

#### A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang mengikuti program PNPMMandiri Perdesaan. Berhubung jumlah seluruh masyarakat para pelaku PNPMMandiri Perdesaan sangat banyak maka ditetapkan dalam penelitian ini sampelnya adalah 40 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dengan metode *cluster sampling*. Dalam hal ini kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang terdiri dari 14 Desa, dari 14 Desa tersebut dipilih sebanyak masing-masing 2 RW jadi ada 30 RW. Kemudian dari 30 RW tersebut diambil sebanyak masing-masing 1 RT jadi ada sebanyak 30 RT, dan dari 30 RT yang telah dipilih kemudian diambil masing-masing 1 dan atau 2 orang responden sebagai sampel. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil adalah = (30 x 1) + 10 orang cadangan = 40 responden.

### B. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi pustaka
2. Field research

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yaitu Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Dalam teknik ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode :

- 1) Interview
- 2) Dokumenter
- 3) Observasi
- 4) Kuesioner

### C. Teknik Analisis Data

1. Uji Beda (Uji Mean)

Untuk menguji perbedaan Pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, Pendampingan, Pelatihan usaha dan Dana Bantuan Langsung sebelum dan sesudah dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten digunakan uji beda. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: (Samsubar Saleh, 2010: 236),

$$t_{hitung} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2)-2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$t_{tabel} = (\alpha; n_1 + n_2 - 2)$$

Keterangan :

$\bar{X}_1$  = Rata-rata hasil program nasional pemberdayaan masyarakat setelah dilaksanakan oleh pemerintah.

$\bar{X}_2$  = Rata-rata hasil program nasional pemberdayaan masyarakat sebelum dilaksanakan oleh pemerintah.

$S_1$  = Simpangan baku setelah program dilaksanakan.

$S_2$  = Simpangan baku sebelum program dilaksanakan.

$n_1$  = Jumlah sampel setelah program dilaksanakan.

$n_2$  = jumlah sampel sebelum program dilaksanakan.

Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka terdapat perbedaan yang nyata antara hasil setelah pelaksanaan PNPMMandiri dengan hasil

sebelum pelaksanaan PNPM. Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima, dan jika  $t_{hitung} <$  dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak.

2. *Benefit Cost Ratio* (B/C Ratio)

$$B/C \text{ ratio} = \frac{\text{Manfaat (Benefit)}}{\text{Biaya usaha}}$$

Dengan perhitungan B/C ratio maka dapat diketahui efisiensi dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh responden. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Uji Beda**

1. Uji Beda terhadap Pemberdayaan

Besarnya  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-2,829 < -1,960$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari sebelum dilaksanakan pemberdayaan lembaga adalah **tidak sama** dengan pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari setelah dilaksanakan pemberdayaan lembaga, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan.

2. Uji Beda terhadap Pendampingan

Karena  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-2,782 < -1,960$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari sebelum dilaksanakan pendampingan adalah **tidak sama** dengan pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari setelah dilaksanakan pendampingan, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan.

3. **Uji Beda terhadap Pelatihan**

Karena  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-3,134 < -1,960$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari sebelum dilaksanakan pelatihan adalah **tidak sama** dengan pengentasan kemiskinan

melalui program PNPM ditinjau dari setelah dilaksanakan pelatihan, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan.

**4. Uji Beda terhadap Dana Bantuan Langsung**

Karena  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-3,479 < -1,960$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari sebelum diberikan dana bantuan langsung adalah tidak sama dengan pengentasan kemiskinan melalui program PNPM ditinjau dari setelah dilaksanakan pelatihan, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan.

**B. Uji Manfaat/ Benefit**

Diketahui bahwa masing-masing variabel setelah dilaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan rasio lebih besar dari 1. Dengan demikian pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan untuk mngentas kemiskinan di Kecamatan Pedan adalah efektif. Dari keempat faktor yang menunjukkan ratio tertinggi adalah dana bantuan/ pinjaman langsung, berarti dana bantuan pinjaman langsung benar-benar bermanfaat bagi responden.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel I berikut ini.

Tabel I

Rasio Faktor Pengentasan Kemiskinan Melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan

No.	Variabel	Rerata Sesudah	Rerata Sebelum	B/Cratio
1	Pemberdayaan	13,250	12,325	1,075
2	Pendampingan	10,950	10,225	1,071
3	Pelatihan	12,175	10,850	1,122
4	Dana bantuan langsung	11,800	10,300	1,146

Sumber : Data primer diolah.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Uji beda (mean) berpasangan antara pemberdayaan lembaga di Kecamatan Pedan sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan diperoleh hasil bahwa besarnya  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau, maka  $H_0$  ditolak,



yang berarti bahwa ada perbedaan yang nyata antara pemberdayaan lembaga di Kecamatan Pedan sebelum dan sesudah dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa setelah ada pelaksanaan PNPM pemberdayaan lembaga di Kecamatan Pedan semakin meningkat.

2. Uji beda (mean) berpasangan antara pendampingan di Kecamatan Pedan sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan diperoleh hasil bahwa besarnya  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau,  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan yang nyata antara pendampingan sebelum dan sesudah dilaksanakan program. Dengan kata lain bahwa setelah ada pelaksanaan PNPM pendampingan para pengusaha di Kecamatan Pedan semakin meningkat.

3. Uji beda (mean) berpasangan antara pelatihan terhadap masyarakat di Kecamatan Pedan sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan diperoleh hasil bahwa besarnya  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau,  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan yang nyata antara pelatihan yang dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakan program. Dengan kata lain bahwa setelah ada pelaksanaan PNPM pelatihan para masyarakat di Kecamatan Pedan semakin meningkat.

4. Uji beda (mean) berpasangan antara pemberian dana pinjaman terhadap masyarakat di Kecamatan Pedan sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan diperoleh hasil bahwa besarnya  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau,  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan yang nyata antara pemberian bantuan pinjaman sebelum dan sesudah dilaksanakan program. Dengan kata lain bahwa setelah ada pelaksanaan PNPM pemberian dana pinjaman pada masyarakat di Kecamatan Pedan semakin meningkat.

5. Berdasarkan pada uji efektifitas menggunakan uji benefit cost ratio diperoleh hasil bahwa masing-masing faktor memiliki angka lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah efektif

karena dapat meningkatkan pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan bantuan dana pinjaman pada masyarakat.

## B. Saran-Saran

1. Mengingat pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan yang diadakan oleh pemerintah dapat meningkatkan pemberdayaan, pendampingan, ketrampilan dan bantuan modal masyarakat di Kecamatan Pedan, maka hendaknya program PNPM Mandiri Perdesaan tetap dilaksanakan bila perlu ditingkatkan dengan melakukan pengendalian, dan evaluasi setiap periodenya.

2. Perlunya agar pemerintah memikirkan sarana dan prasarana yang ada agar sesuai dengan peningkatan dari pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan modal yang ada di masyarakat, karena dengan adanya faktor-faktor tersebut berarti masyarakat butuh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu dengan meningkatnya pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan modal yang ada juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Pedan.

## V. REFERENSI

- Alex S. Nitisemito, (2008). *Manajemen Personalialia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anonim, (2007). *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri*, Tim Pengendali PNPM Mandiri, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- , (2010). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas)*, Bandung: Citra Umbara.
- Edwin B Flipo, (2005). *Manajemen Personalialia*, Edisi Keenam, Jilid 1, Alih Bahasa Moh. Masud, Jakarta : Gramedia.
- Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan, (2007). *Manajemen Personalialia*, Edisi 4, Yogyakarta : BPFE-UGM.

Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah  
Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten

- Karl-Heinz W.Bechtold, (2008). *Politik dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, (2008). *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, Jakarta : LP3ES-UI,
- Miftah Thoha, (2009). *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Rajawali.
- M. Manullang dan Marihot AMH Manullang, (2013). *Manajemen Personalialia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : BPFEE-UGM,
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BPFEE-UGM
- Moh. As'ad, (2004). *Psikologi Industri: Seri Ilmu SumberDaya Manusia*, Edisi Keempat, Yogyakarta : Liberty.
- Munandar (2006). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta : UI-press
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFEE-UGM, 2007.
- Samsubar Saleh, (2010). *Statistik Induktif*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP-AMP-YKPN
- Soejono Soekanto, (2011) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : ZR. Lestiaza.
- Srikandi Waluyo, (2013). *Kerja sama Kelompok yang Efektif*, Edisi 5, Yogyakarta: Kanisius.
- WJS. Poerwodarminto,(2013). *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.